

ABSTRAK

Praktik perkawinan di Desa Wudi tunduk pada aturan Hukum Islam, tradisi dan tetap terikat UUP. Dalam hal sahnya perkawinan masyarakat Desa Wudi tunduk pada aturan Hukum Islam, namun proses sebelum dilaksanakannya perkawinan masyarakat tunduk pada tradisi yang berlaku di tempat tersebut, salah satunya yakni larangan perkawinan karena hubungan *mentelu* dimana tradisi tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam. Meskipun seseorang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketika calon mempelai memiliki hubungan *mentelu*, perkawinannya tidak akan dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan sebagian masyarakat di Desa Wudi lebih tunduk pada tradisi tersebut dibandingkan dengan menaati aturan Hukum Islam meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi tradisi larangan perkawinan karena hubungan *mentelu* serta memperoleh kejelasan pandangan Hukum Islam terkait dengan tradisi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan tradisi larangan perkawinan karena hubungan *mentelu* masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi yang dibuktikan dengan adanya fakta bahwa terdapat orang gagal kawin karena terhalang *mentelu* yang dialami oleh calon pasangan Lisa Anggi Vijayanti dengan Agus yang terjadi pada tahun 2019, dan Sri Utari dengan Sulaiman yang terjadi pada tahun 2019. Selain itu alasan dilarangnya perkawinan hubungan *mentelu* karena *pancer wali* dan dibolehkannya perkawinan hubungan kekerabatan yang lebih dekat karena bukan *pancer wali* tidaklah tepat menurut Hukum Islam. Baik hubungan *mentelu* maupun kekerabatan yang lebih dekat sama-sama memiliki hubungan wali. Larangan ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Tradisi ini juga berasal dari ajaran nenek moyang terdahulu yang berasal dari Agama Hindu. Orang yang percaya dan meyakiniya termasuk dalam golongannya, karena menyupai suatu kaum di mana hal tersebut merupakan perbuatan syirik.. Tindakan masyarakat yang mengharamkan yang halal termasuk juga syirik. Tradisi ini termasuk '*urf al-khas*, '*urf fi'li*, dan '*urf fasid* yang tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai landasan hukum. Dengan demikian tradisi larangan perkawinan karena hubungan *mentelu* tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan sehingga harus kembali kepada norma Hukum Islam.

Kata Kunci : Tradisi, Larangan Perkawinan, Hubungan Kekerabatan.

ABSTRACT

Marriage in Wudi Village is governed by Islamic law and tradition, and is still governed by the UUP (the marriage laws). In terms of the legality of marriage, the Wudi Village community is subject to the rules of Islamic law, but the process before the marriage is carried out is subject to the traditions that apply in that place, one of which is the prohibition of marriage due to mentelu relationships where the tradition is not in accordance with Islamic law. Even though someone has fulfilled the pillars and conditions of marriage, when the prospective bride and groom have a mentelu relationship, the marriage will not continue. This shows that some people in Wudi Village are more subject to this tradition than obeying the rules of Islamic law even though the majority of the population is Muslim. The purpose of this research is to find out the existence of the tradition of prohibiting marriage due to mentelu relationships and to obtain clarity on the views of Islamic law related to the tradition.

The research method used is empirical legal research using a qualitative approach, which is supported by a statutory approach.

*According to the findings of this study, the tradition of prohibiting marriage because the relationship between men and women is still maintained by the people of Wudi Village, which is evidenced by the fact that there are people who fail to marry because of being hindered by money laundering which was experienced by the prospective partner Lisa Anggi Vijayanti with Agus which occurred in 2019, and Sri Utari with Sulaiman. which occurred in 2019. In addition, the reasons for the prohibition of marriages with menelui because of the pancer wali and the permitting of marriages with closer kinship because they are not pancer wali are not appropriate according to Islamic law. Both mentelu relationships and closer kinships both have a guardian relationship. This practice is based on Hindu beliefs and may be found in the book *Mujarabat & Betalsun Adimmakna*. People who trust and believe in it are included in their group because they fit in with a people who consider it an act of shirk. Because there is no nash that forbids it, this restriction is not in accordance with Islamic law. The community's acts that forbid what is lawful are also shirked. This tradition comprises 'urf al-khas, 'urf fi'li, and 'urf fasid, which do not fulfill the legal requirements to be used as a legal basis. As a result, the tradition of forbidding marriage because of the mentelu relationship is unlawful and cannot be carried out, and it must revert to Islamic law principles.*

Keywords: Tradition, Prohibition of Marriage, Kinship